



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KEBUPATEN PASAMAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2024, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2024, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19830415 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
4. Kepegawaian.....	3
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	6
BAB III HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN OPD	9
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	25
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	25
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1. **Gambaran Umum Satpol PP dan Damkar**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, sehingga diperlukan pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat kabupaten Pasaman.

Salah satu lembaga yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP.

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peran Satpol PP dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

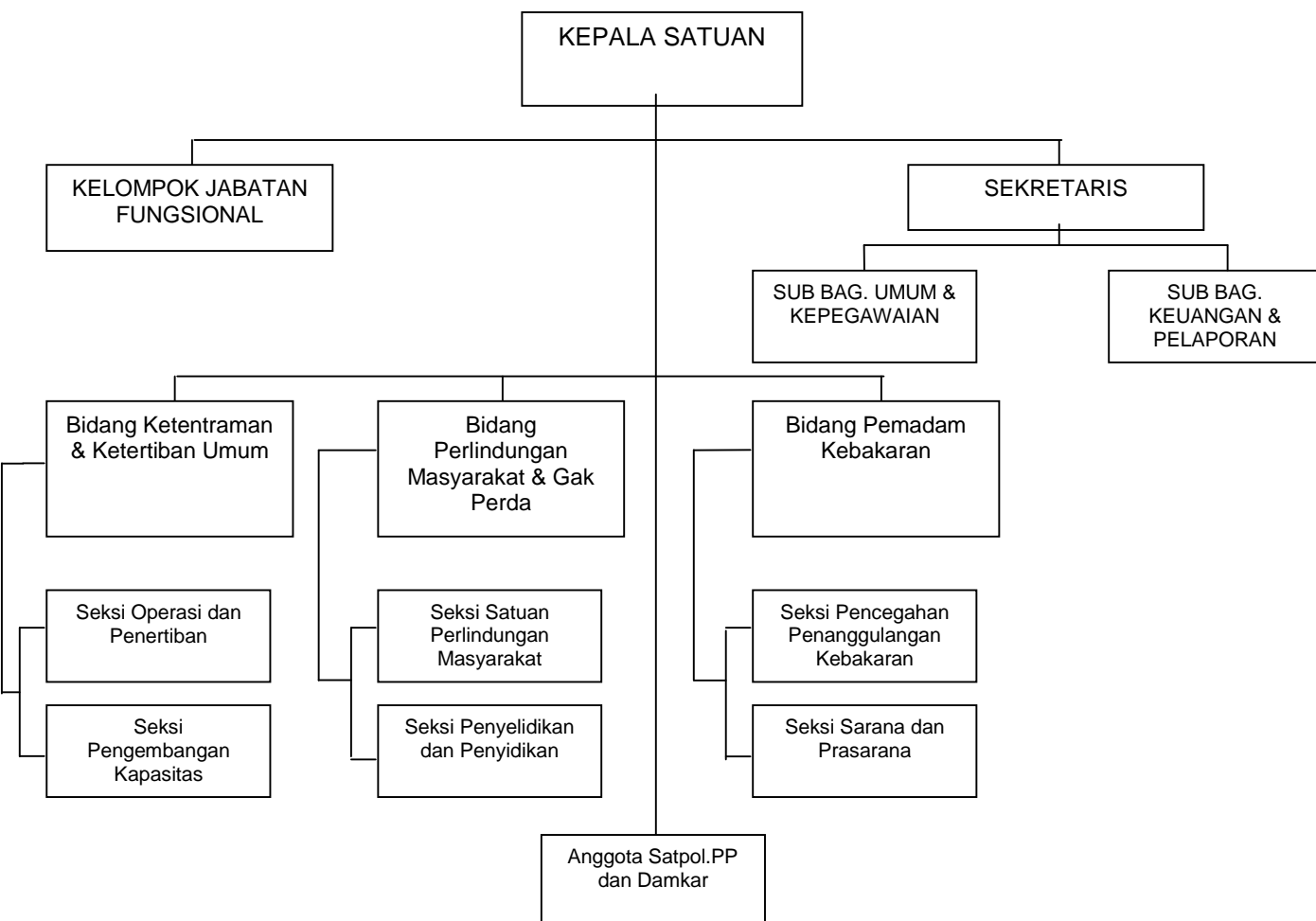
Selanjutnya payung hukum untuk mengatur keberadaan Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, antara lain disebutkan kewenangan Satpol PP adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah. Serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Penertiban.
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepegawaian

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman dengan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kasi, 19 (delapan belas) orang staf PNS dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut :

- 1 orang menjabat Eselon II.b
- 1 orang menjabat Eselon III.a
- 3 orang menjabat Eselon III.b
- 6 orang menjabat Eselon IV.a

Sumber daya manusia pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman dapat digambarkan berdasarkan jabatan, pendidikan formal dan yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman

No	NAMA	L / P	JABATAN	Gol./ Pangkat	PENSI DIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A. STRUKTURAL						
1.	AAN AFRINALDI, S.STP, MM	L	Kepala Satpol. PP dan Damkar	IV/b Pembina Tingkat I	DIV Pemerintahan	PIM III
2.	APRIALDI SAID, SH	L	Sekretaris	IV/b Pembina Tingkat I	S1 Ilmu Hukum	PIM III
3.	ZULFAHMI, SH	L	Kabid Tibumtranmas	IV/b Pembina	S1 Ilmu Hukum	PIM IV
4.	ETRIWALDI, SH	L	Kabid Damkar	IV/b Pembina	S1 Ilmu Hukum	PIM III
5.	ZULBAHAR, SH	L	Kabid Linmas dan Gak Perda	IV/b Pembina	S1 Ilmu Hukum	-
6.	SUETNI FELLY YONRA, SH	L	Kasi Satlinmas	III/d Penata	S1 Ilmu Hukum	-
7.	ASTUTI, SH	P	Kasi Bangpas	III/c Penata	S1 Ilmu Hukum	-
8.	HENDRA FAUZI, SE	L	Kasubag Keuangan & Evalop	III/c Penata	S1 Ilmu Ekonomi	-
9.	TEGUH SETIA HIDAYATULLAH, S.STP	L	Kasi Ops & Penertiban	III/c Penata	S1 Ilmu Pemerintahan	-
10.	YUZA DWANSYAH, S.STP	L	Kasubag Umum & Kepegawaian	III/c Penata	D-IV Politik Pemerintahan	-
11.	BAYU MATIO KARDO, SH	L	Kasi Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran	III/c Penata	S1 Ilmu Hukum	-
12.	ROMY SYAPUTRA, SE	L	Pengadministrasian Umum	III/d Penata Tk. I	S1 Ilmu Ekonomi	-
13.	FIRMAN, SH	L	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b Penata Muda Tk. I	S1 Ilmu Hukum	-
14.	DEDY TRI MULYA	L	Pengadministrasian Umum	III/a Penata Muda	SLTA	-
15.	EDIMON VICTER	L	Pranata Perlindungan Masyarakat	III/a Penata Muda	SLTA	-
16.	M. RIZAL LUBIS	L	Teknis Sarana dan Prasarana	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
17.	DODI ERIANTO	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
18.	YAUMIL AKBAR	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/d Pengatur Tk. I	SLTA	-
19.	DIFLIZAR	L	Teknis Sarana	II/d	SLTA	-

			dan Prasarana	Pengatur Tk. I		
20.	SYAFRIL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
21.	HENDRI	L	Pengadministrasian Umum	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
22.	ANRIZAL	L	Komandan Petugas Keamanan	II/d Pengatur Tingkat I	SLTA	-
23.	EVISON	L	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/b Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-
24.	ZAINAL	L	Petugas Keamanan	II/a Pengatur Muda	SLTP	-
25.	GUSRINAL	L	Pramu kebersihan	I/d Juru Tingkat I	SD	-
26.	FERDI JUNIANTO, SH	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-
27.	YULIARDI. R	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
28.	HIDAYAT	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
29.	DENI AGUSMAL	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	SLTA	-
30.	GILANG RAMADHAN	L	Pemula Pemadam Kebakaran	II/a Pengatur Muda	S1 Ilmu Hukum	-

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Satpol. PP dan Damkar sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pajak Daerah	80.000.000	80.000.000
2.	Retribusi Daerah	1.520.000	1.520.000
JUMLAH		81.520.000	81.520.000

Realisasi Pendapatan Daerah Satpol. PP dan Damkar pada tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target PAD	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	80.000.000	85.488.865	106,86
2.	Retribusi Daerah	1.520.000	1.525.000	100,33
JUMLAH		81.520.000	87.013.865	106,74

2.2 Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun 2024

Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Satpol. PP Dan Damkar sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.3
Belanja Daerah serta Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/sub kegiatan/kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.909.696.014	4.841.358.144
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.630.700	15.630.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200	7.988.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500	7.642.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.128.768.114	2.990.627.912
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.035.768.114	2.897.627.912
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000	93.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	760.000	760.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	760.000	760.000

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.593.000	166.212.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000	5.060.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.586.500	18.902.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000	12.050.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.501.000	3.501.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.395.500	126.699.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.500.000	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.634.200	1.495.132.832
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.330.200	31.828.832
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000	1.463.304.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.810.000	172.994.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.500.000	164.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	730.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.920.000	2.604.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.660.000	5.660.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.041.802.200	1.020.348.300
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.026.146.800	1.004.692.900
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	451.292.200	478.795.600
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	11.856.600	11.856.600
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	105.000	105.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	512.670.000	494.110.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.765.300	19.765.300

	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	30.457.700	60.400
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	15.655.400	15.655.400
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800	87.800
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	15.462.600	15.462.600
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	105.000	105.000
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	627.674.600	693.482.700
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	527.377.400	593.185.500
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.700	175.700
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.885.100	590.453.200
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	175.700	175.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	64.000	2.304.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	76.900	76.900
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	162.800	162.800
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	162.800	162.800
	Investigasi Kejadian Kebakaran	70.300	70.300
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300	70.300
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.064.100	100.064.100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	100.000.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	64.100	64.100

Alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satpol. PP dan Damkar tahun 2024 adalah 3 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Realisasi belanja daerah serta realisasi program dan kegiatan Satpol. PP dan Damkar tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Daerah serta Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Urusan / Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200,-	4.741.500,-	59,36
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500,-	3.424.000,-	44,80
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.627.912,-	2.823.562.769,-	97,44
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,-	85.415.000,-	91,84
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000,-	0,-	0
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.905.000,-	96,94
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.902.500,-	11.269.500,-	59,62
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000,-	9.422.000,-	78,19
		d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.501.000,-	3.040.000,-	86,83
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.699.200,-	113.866.850,-	89,87
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			

		Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.828.832,-	21.960.304,-	69,00
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000,-	1.315.661.080,-	89,91
		6. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.000.000,-	133.530.900,-	81,42
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,-	0,-	0
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.604.000,-	2.573.000,-	98,81
		d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.660.000,-	5.600.000,-	98,94
II	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	478.795.600,-	433.312.950,-	90,50
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda	11.856.600,-	11.825.600,-	99,74

		dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	105.000,-	0,-	0
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.110.000,-	457.690.300,-	92,63
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.765.300,-	19.528.700,-	98,80
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	60.400,-	0,-	0
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800,-	0,-	0
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	15.462.600,-	15.059.000,-	97,39
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	105.000,-	0,-	0
III	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran			

n non Kebakaran	dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	175.700,-	0,-	0
	a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	590.453.200,-	477.368.000,-	80,85
	b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	175.700,-	0,-	0
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.304.000,-	0,-	0
	d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	76.900,-	0,-	0
	2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	162.800,-	0,-	0
	3. Investigasi Kejadian Kebakaran			
	a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300,-	0,-	0
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,-	71.708.550,-	71,71
	b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	64.100,-	0,-	0

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran Satpol. PP dan Damkar setelah perubahan tahun 2024 realisasinya adalah Rp.6.025.465.003 dengan persentase keuangan 91,92 %. Dengan pagu yang telah terealisasi Satpol. PP dan Damkar telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik meskipun ada sub kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mesti karena ada pengurangan anggaran.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Satpol. PP dan Damkar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	35 laporan	35 laporan	100 %
2.	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	25 laporan	25 laporan	100 %
3.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	55 dokumen	0 dokumen	0 %
4.	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62 dokumen	62 dokumen	100 %
5.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	50 orang	34 orang	68 %

	Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
6.	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	35 laporan	0 laporan	0 %
7.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda /Perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku/ usaha	1 laporan	0 laporan	0 %
8.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25 laporan	25 laporan	100 %
9.	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	55 laporan	0 laporan	0 %
Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan non Kebakaran serta Penyelamatan				
10.	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	40 dokumen	0 dokumen	0 %
11.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14 laporan	14 laporan	100 %
12.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	17 dokumen	0 dokumen	0 %
13.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 keluarga	40 keluarga	200 %
14.	Jumlah dokumen yang memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	30 dokumen	0 dokumen	0 %

15.	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	35 dokumen	0 dokumen	0 %
16.	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	120 orang	40 orang	33 %
17.	Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	120 orang	0 orang	0 %

3.1.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja program dan kegiatan dituangkan pada tabel dibawah ini:

3.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.841.358.144	4.538.971.903	93,75			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.630.700	8.165.500	52,24			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200	4.741.500	59,36			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500	3.424.000	44,80			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.990.627.912	2.908.977.769	97,27			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.627.912	2.823.562.769	97,44			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000	85.415.000	91,84			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	760.000	0	0,00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000	0	0,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.212.700	142.503.350	85,74			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000	4.905.000	96,94			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.902.500	11.269.500	59,62			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000	9.422.000	78,19			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3.501.000	3.040.000	86,83			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.699.200	113.866.850	89,87			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.495.132.832	1.337.621.384	89,47			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.828.832	21.960.304	69,00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000	1.315.661.080	89,91			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.994.000	141.703.900	81,91			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.000.000	133.530.900	81,42			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	0	0,00			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.604.000	2.573.000	98,81			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.660.000	5.600.000	98,94			
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.020.348.300	937.416.550	91,87			
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.004.692.900	922.357.550	91,80			
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	478.795.600	433.312.950	90,50			
				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	11.856.600	11.825.600	99,74			
				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	105.000	0	0,00			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.110.000	457.690.300	92,63			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.765.300	19.528.700	98,80			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	60.400	0	0,00			
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	15.655.400	15.059.000	96,19			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800	0	0,00			
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	15.462.600	15.059.000	97,39			
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	105.000	0	0,00			
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan non Kebakaran	693.482.700	549.076.550	79,18			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.185.500	477.368.000	80,48			
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.700	0	0,00			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	590.453.200	477.368.000	80,85			
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	175.700	0	0,00			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.304.000	0	0,00			
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	76.900	0	0,00			
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	162.800	0	0,00			
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	162.800	0	0,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN (Rp)	Realisasi (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
				Investigasi Kejadian Kebakaran	70.300	0	0,00			
				Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300	0	0,00			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.064.100	71.708.550	71,66			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	71.708.550	71,71			
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	64.100	0	0,00			
JUMLAH					6.555.189.144	6.025.465.003	91,92			

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

Satpol. PP dan Damkar tahun 2024 adalah 3 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.6.555.189.144,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.025.465.003,- dengan persentase keuangan 91,92 % dan persentase fisik 99,81 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dianggarkan dana sebesar Rp. 7.988.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.741.500,- presentase realisasi anggaran sebesar 59,36% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah : RKA, DPA, RENJA dan RENSTRA
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dianggarkan dana sebesar Rp. 7.642.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.424.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 44,80% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan laporan tahunan pada Satpol. PP dan Damkar

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.897.627.912,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.823.562.769,- presentase realisasi anggaran sebesar 97,44% dan realisasi fisik 100% untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dianggarkan dana sebesar Rp. 93.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.415.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 91,84% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dianggarkan dana sebesar Rp. 760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0,-% dan realisasi fisik 0%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.905.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 96,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan komponen atau alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dianggarkan dana sebesar Rp. 18.902.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.269.500,- Presentase realisasi anggaran sebesar 59,62% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor berupa atk.

- 3) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 12.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.422.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 78,19% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan barang cetak dan penggandaan, serta pembuatan spanduk untuk kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.
- 4) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.501.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.040.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 86,83% dan realisasi fisik 100% Kegiatan ini berupa tagihan bahan bacaan berupa koran baik harian maupun mingguan, sehingga pegawai dapat menikmati bahan bacaan di kantor.
- 5) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 126.699.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.866.850,- Presentase realisasi anggaran sebesar 89,87% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, dan luar provinsi.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 31.828.832,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.960.304,- Presentase realisasi anggaran sebesar 69,00% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran tagihan air, listrik dan telepon.
- 2) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.463.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.315.661.080,- Presentase realisasi anggaran sebesar 89,91% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak, honor daerah serta pembayaran tagihan JKK dan JKM.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 164.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.530.900,- Presentase realisasi anggaran sebesar 81,42% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran pajak, pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 dan roda 6 (non hidrolis).
- 2) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 730.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- Presentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa instal komputer.
- 3) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.573.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,81% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dan perawatan gedung kantor.

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.600.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan meja kantor, lemari kantor dan rak arsip kantor .

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
Anggaran sebesar Rp. 478.795.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 433.312.950,- persentase realisasi anggaran sebesar 90,50% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya patroli / monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 40 kali, penegakan disiplin ASN sebanyak 10 kali, penertiban kekayaan daerah sebanyak 10 kali, Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 22 kali kegiatan, penertiban penegakan Disiplin anak sekolah sebanyak 20 Kali penertiban dan Pengamanan Natal / operasi lilin singgalang 2024 berjumlah 8 hari kegiatan.
 - Pada tahun ini juga dilaksanakan penempatan BKO Kecamatan berdasarkan surat Perintah Kasat Pol. PP & Damkar sebanyak 10 Kecamatan yang terdiri atas 2 orang per Kecamatan dengan jumlah 20 orang dengan tugas utama penertiban /penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024. sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim
 - Terlaksananya juga pengamanan (Piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan personil berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat.
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Anggaran sebesar Rp. 11.856.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.825.600,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,74% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 18 kali kegiatan dan Operasi Warung Kelambu (WARKEL) pada bulan suci Ramadhan berjumlah 12 kali kegiatan.
- 3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota

Anggaran sebesar Rp. 105.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.

4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran sebesar Rp. 494.110.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 457.690.300,- persentase realisasi anggaran sebesar 92,63% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Pelaksanaan peran Satlinmas dalam pemantauan situasi menjelang pemilu serentak 2024, agar dapat segera mungkin memberikan informasi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu (pilpres dan pileg)
- Telah dilaksanakan pembentukan satlinmas pada tiap-tiap TPS guna menjadi petugas ketertiban TPS 2024 di 12 kecamatan dalam lingkup Kab. Pasaman
- Telah melaksanakan monitoring kantibmas dalam rangka pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024
- Cipta kondisi tibumtranmas 2024
- Telah dilaksanakan pengamanan pilkada serentak 2024

5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran sebesar Rp. 19.765.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.528.700,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,80% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan acara Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Nasional ke-74 dan Satlinmas ke- 62 di Kota Padang
- Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar serta dengan Satpol. PP Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait batas wilayah tentang Trantibum dan Penegakan Perda di daerah terpencil.

6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
Anggaran sebesar Rp. 60.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Telah memberikan layanan optimal baik informasi maupun penegakan dalam penegakan perda
- Telah memberikan sosialisasi terkait dengan dampak penegakan Perda
- Telah melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kecamatan guna koordinasi dengan Kasi Trantibum terkait dengan layanan dampak penegakan perda itu sendiri.
- Tersedia dana pada TW 1 –TW 3 kemudian pada TW. IV anggaran di geser ke kegiatan lain karena dana pada kegiatan ini tidak terpakai maksimal karena dalam tahun 2024 tidak terdapat ganti rugi maupun layanan dampak dari penegakan Perda/Perbup itu sendiri.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Anggaran sebesar Rp. 87.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah untuk tahun ini tidak terlaksananya sosialisasi penegakan Perda dan Perbup dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 15.462.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.059.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 97,39% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan menertibkan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjumlah 30 kali kegiatan, Izin usaha Warung Internet (WARNET) dan Izin Usaha Depot Air Minum dengan jumlah keseluruhan 8 Kali kegiatan, Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah keseluruhan 15 Kali kegiatan, kegiatan tersebut terlaksana sampai bulan Desember 2024.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 105.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Untuk tahun 2024 sub kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 175.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.
Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
 - Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.
 - Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
 - Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
 - Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.

- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran sebesar Rp. 590.453.200,- dengan realisasi sebesar Rp.477.368.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 80,85% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 34 kali di Kabupaten Pasaman.
- 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran
Anggaran sebesar Rp.175.700,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Rao Selatan.
 - Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 75 kali dan pemotongan cincin 1 kali.
- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Anggaran sebesar Rp.76.900,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Sub kegiatan tetap dilaksanakan yang anggaran dibebankan pada si pemohon. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pelatihan pencegahan kebakaran dini terhadap 6 kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang
 - Masyarakat mengerti dan paham akan cara penanggulangan dini kebakaran

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Anggaran sebesar Rp.162.800,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Terlaksananya pengecekan sarana dan prasarana secara rutin.
 - Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi.

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Anggaran sebesar Rp.70.300,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
 - Diketahui penyebab terjadinya kebakaran
 - Diketahui jumlah korban dari kebakaran yang terjadi
 - Diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban kebakaran

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.708.550,- persentase realisasi anggaran sebesar 71,71% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan dini kebakaran bagi masyarakat sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 40 orang
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran anggaran sebesar Rp.64.100,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.

Dari program/kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (Indikator Sasaran Renstra SKPD)
Urusan Wajib Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	30 laporan	30 laporan	100 %
2.	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	laporan	25 laporan	25 laporan	100 %
3.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	dokumen	50 dokumen	0 dokumen	0 %

	Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
4.	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	62 dokumen	62 dokumen	100 %
5.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	50 orang	34 orang	68 %
6.	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	laporan	35 laporan	0 laporan	0 %
7.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku/ usaha	laporan	1 laporan	0 laporan	0 %
8.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	laporan	25 laporan	25 laporan	100 %
9.	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	laporan	55 laporan	0 laporan	0 %
10.	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	dokumen	40 dokumen	0 dokumen	0 %
11.	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	14 laporan	14 laporan	100 %
12.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat	dokumen	17 dokumen	0 dokumen	0 %

	Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				
13.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	20 keluarga	40 keluarga	200 %
14.	Jumlah dokumen yang memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	30 dokumen	0 dokumen	0 %
15.	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	dokumen	35 dokumen	0 dokumen	0 %
16.	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	orang	120 orang	40 orang	33 %
17.	Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	orang	120 orang	0 orang	0 %

Dari tabel diatas dapat dilihat semua kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa indikator yang tidak tercapai dikarenakan ada faktor pengurangan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dimana semua kegiatan pada Satpol. PP dan Damkar mendukung untuk pencapaian kinerja.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pada tahun 2024 ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

- Kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan.
- Anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif.

- Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.
- Rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.
- Kurangnya posko Pemadam Kebakaran dan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain:

- Diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi)
- Penambahan anggaran operasi dan penertiban
- Penambahan PNS untuk Satpol PP dan Damkar.
- Adanya pelatihan atau diklat dan penambahan anggaran.
- Penambahan posko Pemadam Kebakaran sehingga respon time 15 menit dapat terlaksana dan penambahan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu Tahun Anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penempatan Polisi Pamong Praja Bawah Kendali Operasi Kecamatan di 10 kecamatan Kabupaten Pasaman	Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nomor : 300/02/Satpol. PP dan Damkar/2024 tanggal 12 Januari 2024	Penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk melakukan operasi terhadap penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat	Telah kami lakukan operasi terhadap Penyakit Masyarakat yang ada dikabupaten Pasaman antara lain :	
		1. Penertiban Pengunjung Hotel yang bukan Suami Istri	a. Selama tahun 2024 ada beberapa kali dilakukan penertiban pengunjung Hotel yang bukan suami istri diantaranya Hotel dan ini sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga perlu dilakukan penertiban agar tidak terjadi lagi dimana pengunjung bukan suami istri yang menginap disana b. Pada akhir tahun kami melakukan Operasi Penertiban Hotel agar terjadinya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lubuk Sikaping aman
		2. Penertiban Minuman Keras seperti Tuak	Telah sering dilakukan penertiban Miras di Kabupaten Pasaman karena banyaknya laporan dari masyarakat bahwa semakin banyaknya tempat penjualah miras terutama di Kecamatan Panti, Rao dan Tigo Nagari sehingga membuat resah masyarakat sekitar. Bagi yang kedapatan pada saat Operasi penertiban

			tersebut kami berikan Sanksi lisan dan tegur secara tertulis
		3. Penertiban Café yang menyediakan Wanita Penghibur (PSK)	Banyaknya pengaduan masyarakat tentang banyaknya Wanita malam di Café Dua Koto dan Rimbo Panti seperti wanita-wanita yang terjaring dalam operasi 3 pilar yang mana di kirim ke pusat panti rehabilitasi Andam Dewi guna efek jera.
		4. Penertiban Muda mudi yang berbuat maksiat di tempat- tempat tertentu	semakin maraknya muda mudi yang pacaran di tempat-tempat umum (Gelora, Gor dan Atrium ruko) sehingga sangat meresahkan warga setempat dan bagi muda mudi yang dapat pada operasi tersebut kami bawa kantor dan proses sesuai prosedur yang ada

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan..... **(nihil)**
- 4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian..... **(nihil)**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2024 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang tidak bisa diatasi sendiri oleh Satpol PP dan Damkar antara lain masalah kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.

B. SARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar pada tahun 2025 diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi), penambahan anggaran operasi dan penertiban, penambahan PNS untuk Satpol PP dan Damkar serta adanya pelatihan atau diklat untuk aparat Pol. PP, kurangnya posko Pemadam Kebakaran sehingga respon time 15 menit tidak terlaksana dan penambahan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran mengingat beban kerja untuk kedepannya semakin berat. Dengan demikian, Satpol PP dan Damkar dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini di sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2025
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19830415 200212 1 001